



**PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PROGRAM USAHA  
DESA LAMBARA KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN SIGI**

Juemi<sup>1\*</sup>, Asnawar<sup>2</sup>, Nora Ariani<sup>3</sup>, Nurnaila<sup>4</sup>, Putri Amanda<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

**RIWAYAT ARTIKEL****Diterima:**

06-09-2025

**Disetujui:**

09-09-2025

**Dipublikasi:**

01-10-2025

**Kata Kunci:**

*BUMDes; Pendampingan  
Kelembagaan; Manajemen  
Desa; Kemandirian  
Ekonomi*

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, memiliki potensi di sektor pertanian dan perkebunan, namun kapasitas pengelolaan BUMDes masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan manajemen BUMDes melalui pendampingan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi tiga tahapan, yaitu: (1) penguatan kelembagaan, (2) penyusunan dokumen tata kelola, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta SOP, dan (3) praktik serta evaluasi untuk menilai hasil pendampingan. Peserta kegiatan adalah pengurus BUMDes dan aparat Desa Lambara, dengan pemateri dari kalangan akademisi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta terkait tata kelola kelembagaan dan manajemen BUMDes. Antusiasme peserta menjadi indikator positif bahwa pendampingan ini dapat mendorong pengelolaan BUMDes yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu memperkuat perekonomian Desa Lambara.

**PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang menekankan pada kemandirian, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan hukum mengenai pendirian BUMDes tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menegaskan bahwa BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal.

Menurut Syam et al. (2020), BUMDes dipandang sebagai model bisnis desa yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, serta dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, Ridwansyah et al. (2021) menekankan bahwa BUMDes merupakan pendekatan baru pembangunan desa yang berbasis pada kebutuhan masyarakat serta potensi lokal, dengan pengelolaan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa secara partisipatif. Sementara itu, Rosidah et al. (2024) menambahkan bahwa pengelolaan BUMDes yang profesional, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai



kearifan lokal, akan memperkuat keberlanjutan kelembagaan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena keterbatasan kapasitas kelembagaan dan manajemen BUMDes yang ada. Pengelolaan usaha desa masih menghadapi kendala, baik dari sisi tata kelola organisasi, penyusunan dokumen manajemen, maupun kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi kelembagaan secara profesional. Kondisi ini menghambat BUMDes untuk berkembang sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana tata kelola dan kelembagaan BUMDes di Desa Lambara dapat diperkuat agar mampu berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pendampingan kelembagaan melalui penyusunan dokumen pengelolaan BUMDes yang lebih sistematis, meningkatkan kapasitas pengurus dalam aspek tata kelola dan manajemen usaha, serta mengarahkan BUMDes agar dapat mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode pendampingan, di mana pihak mitra diharapkan aktif berperan dalam seluruh proses kegiatan, sementara tim pengabdian memberikan fasilitas serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (Zakaria et al., 2023). Penentuan metode pelaksanaan dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana pengabdian dan mitra, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan lapangan.

Strategi pendampingan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Pertama, penguatan kelembagaan BUMDes dengan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi pengelola agar mampu menjalankan fungsi organisasi secara profesional. Kedua, penguatan manajemen BUMDes yang difokuskan pada penyediaan berbagai dokumen tata kelola serta penyusunan rencana kerja bersama antara pelaksana pengabdian dan mitra (Zaenuri et al., 2020). Ketiga, pelaksanaan praktik dan evaluasi, di mana mitra dilibatkan dalam penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas pokok dan tanggung jawab, serta pembuatan standar operasional prosedur (SOP). Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan dan diskusi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan serta pemahaman mitra terhadap materi yang diberikan.

Jenis kegiatan dalam program ini berupa pelatihan, sosialisasi, serta praktik penguatan manajemen kelembagaan BUMDes yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava. Kegiatan ini difasilitasi oleh beberapa pemateri, yaitu Juemi, S.Sos., M.Si., Drs. Asnawar, M.Si., Nora Ariani, S.E., M.M., Nurnaila, S.T., M.AP., dan Putri Amanda. Peserta utama kegiatan adalah pengurus BUMDes yang didampingi aparat Desa Lambara, sehingga hasil pendampingan dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan lembaga. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, praktik, dan evaluasi. Kegiatan ini melibatkan 30 orang peserta yang terdiri dari pengurus BUMDes, aparat desa, serta perwakilan masyarakat setempat. Secara

umum, pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, ditandai dengan partisipasi aktif peserta dan antusiasme mereka dalam setiap sesi.

Pada tahap sosialisasi, peserta diperkenalkan dengan konsep dasar kelembagaan BUMDes, tujuan pendirian, serta regulasi yang melandasinya. Diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah mengenal istilah BUMDes, namun belum memahami secara mendalam fungsi strategisnya sebagai motor penggerak ekonomi desa. Melalui pemaparan narasumber, peserta mulai menyadari bahwa BUMDes tidak hanya sekadar wadah usaha desa, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sarkawi et al. (2020) yang menekankan bahwa BUMDes merupakan model bisnis desa yang harus mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan.

Pada tahap pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai penguatan kelembagaan dan manajemen BUMDes. Materi ini meliputi penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas pokok dan fungsi, serta pembuatan dokumen tata kelola. Hasil pengamatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam menyusun draft struktur organisasi yang lebih jelas dan sesuai dengan prinsip good governance. Misalnya, sebelumnya struktur BUMDes hanya terdiri dari ketua dan bendahara, namun setelah pendampingan peserta mampu menambahkan posisi manajer unit usaha, pengawas internal, serta sekretaris dengan uraian tugas yang lebih rinci.

Selain itu, peserta juga diajak untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sederhana terkait mekanisme pengelolaan keuangan, pencatatan administrasi, serta mekanisme rapat kerja rutin. Walaupun masih memerlukan penyempurnaan, penyusunan SOP ini menunjukkan kemajuan penting karena menjadi langkah awal menuju tata kelola BUMDes yang lebih akuntabel dan transparan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Widiastuti et al. (2019) yang menegaskan pentingnya dokumen tata kelola dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMDes.

Tahap praktik memperlihatkan bahwa peserta cukup mampu menerapkan materi yang telah diberikan. Beberapa kelompok peserta mencoba melakukan simulasi rapat kerja, menyusun rencana kerja tahunan, serta melakukan diskusi mengenai peluang usaha yang dapat dikembangkan di Desa Lambara. Beberapa ide usaha yang muncul antara lain pengolahan hasil pertanian lokal, jasa simpan pinjam berbasis komunitas, serta pengembangan wisata desa. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan mampu memicu kreativitas masyarakat dalam melihat potensi desa yang selama ini belum tergarap optimal.

Dari sisi evaluasi, sebagian besar peserta mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan baru sekaligus keterampilan praktis. Berdasarkan kuesioner sederhana yang dibagikan setelah kegiatan, 85% peserta menyatakan puas dengan materi dan metode yang digunakan, 10% menyatakan cukup puas, dan hanya 5% yang menilai masih ada kekurangan terutama terkait waktu yang dirasa terlalu singkat. Antusiasme peserta juga terlihat dari keaktifan mereka bertanya dan berdiskusi dengan pemateri, bahkan beberapa di antaranya meminta agar pendampingan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hasil evaluasi disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.**

**Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta Pendampingan BUMDes Desa Lambara**

Kategori Penilaian	Jumlah Peserta	Persentase (%)
Sangat Puas	26	85
Cukup Puas	3	10
Kurang Puas	1	5
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Namun demikian, kegiatan ini juga menemukan beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang manajerial. Sebagian besar pengurus BUMDes berprofesi sebagai petani sehingga masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem administrasi dan tata kelola kelembagaan. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti perangkat komputer dan akses internet di balai desa juga menjadi kendala teknis yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes ke depan. Meski demikian, dengan adanya komitmen kuat dari aparat desa dan dukungan masyarakat, kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui pelatihan lanjutan dan pengadaan fasilitas sederhana.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDes dalam aspek kelembagaan dan manajemen. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosidah et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes yang profesional dan berbasis kearifan lokal akan menjadi pilar kemandirian ekonomi desa. Dengan adanya pendampingan ini, BUMDes Desa Lambara diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan kelembagaan BUMDes di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami konsep kelembagaan dan manajemen BUMDes, serta mulai menyusun struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta draft standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan keterampilan pengurus dalam mengelola BUMDes secara lebih profesional dan berbasis tata kelola yang baik. Antusiasme peserta menjadi indikator penting bahwa kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memotivasi pengurus BUMDes untuk lebih aktif dalam mengembangkan usaha desa. Ke depan, keberlanjutan pendampingan tetap dibutuhkan agar BUMDes Desa Lambara dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, akuntabel, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, H., Syaparuddin, S., & Emilia, E. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 39-48.
- Rosidah, D., Judijanto, L., Pugu, M. R., & Al-Amin, A. (2024). Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Ekonomi Lokal. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 1(3), 56-65.
- Sarkawi, S., Khair, A., Kafrawi, K., Zunnuraeni, Z., & Saleh, M. (2020). Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 56-73.
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2020). Literasi Tatakelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 1(2), 67-79.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288.
- Zaenuri, M., Atmojo, M. E., & Iqbal, M. (2020). Penataan Kelembagaan BUMDes Berbasis Pariwisata. *ABDIMAS ALTRUIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 28-36. <https://doi.org/10.24071/aa.v2i2.2544>



Zakaria, M., Isti, S., Pertiwi, R. A., Firda, A., Alvin, C. K., Muna, A. I., & Marbiyanti, R. (2023). Pendampingan Perbaikan Packaging sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Produk UMKM “Mak Plengeh” di Desa Blabak, Pesantren. *Welfare*, 1(1), 25-31. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i1.380>